

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata^{*)}

^{*)}Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim
Email: Sonnyikhsan@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Sedangkan objek yang diteliti adalah Belanja Daerah dan data Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil pengujian Belanja Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Keywords: *Belanja Daerah, Kinerja Keuangan*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan istilah desentralisasi.

Dengan adanya otonom daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dalam membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup kuat.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan pihak untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung).

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang menjadi pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Banyaknya belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

Dalam mengalokasikan komponen belanja langsung yang berupa belanja modal pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yaitu mengarahkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi di daerah. Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonominya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Satuan kerja perangkat daerah kemudian menyusun belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Belanja diterima daerah yang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum dapat mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterbatasan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah itu sendiri. Banyak pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang harus dilakukan khususnya di Aceh untuk membantu proses percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bireuen dalam menginventarisasi kebutuhan dan taksiran anggarannya hampir setiap tahun tidak tercapai seperti yang diharapkan. Artinya, taksiran dana yang disulitkan sering dimentahkan oleh tim penyusunan anggaran daerah pada saat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara keseluruhan dengan alasan berbagai faktor. Akibatnya banyak program tidak berjalan maksimal. Hasilnya pun tidak begitu terasa bagi masyarakat. Ironinya justru ada lembaga atau dinas lain yang ditambah lagi pagu anggaran dari anggaran yang diusulkan sebelumnya. Tendensi ini mengisyaratkan bahwa pihak legislatif lebih *concern* terhadap kegiatan yang mengarah pada aktivitas pembangunan fisik sarana dan prasarana.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh, dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk

kewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran keuangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.

Salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / jasa yang mungkin akan terjadi pada tahun anggaran yang berkenaan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan APBD yang baik harus berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik.

2. Kajian Teoritis

a. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang menjadi pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa banyaknya belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitriyani (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

Menurut Halim (2012) belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang

menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dan pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dalam pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 ayat (1): "Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya".

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

b. Kinerja Keuangan **Pengertian Kinerja Keuangan**

Pengertian kinerja menurut Bastian (2016), adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan menurut Gitosudarmo (2012) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Irhan (2011), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Irhan (2011), adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2010) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2016), kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

3. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber data-data dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear Sederhana. Analisis regresi linear digunakan untuk membuktikan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan :

- Y = Belanja Daerah
- a = Konstanta
- b = Slope atau Koefisien Regresi
- x = Kinerja Keuangan
- e = Error

4. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

Sebagaimana tujuan penelitian yang melatar belakangi penelitian ini adalah, untuk mengetahui pengaruh ukuran, kemakmuran dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bireuen, dengan model analisisnya adalah persamaan regresi Sederhana:

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Berdasarkan pengolahan data penelitian, diperoleh model regresi dari kedua pengukuran yang dijadikan tujuan penelitian ini masing-masing adalah:

Tabel 1. Hasil Regresi Analisis Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat	Prob.
Belanja Daerah	7.058E-005	0.001	0.113	0.915
C	-6817509143.15	332273035.59	-2.052	0.109

Sumber: Data Sekunder Diolah Dengan SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 1 diatas, didapatkan persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$Y = -6817509143.15 + 7.058X + e.$$

Nilai konstanta (a) sebesar - 6817509143.153. Artinya jika variabel kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh variabel bebasnya atau sama dengan 1, maka nilai kinerja keuangan pemerintah akan berkurang sebesar -6817509143.153.

Nilai koefisien b sebesar 7.058. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan (X) mengalami kenaikan 1%, maka (Y) akan mengalami kenaikan sebesar sebesar 7.058%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara (X) dengan (Y).

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nilai statistik-t untuk koefisien belanja daerah (X) pada model regresi nilai ini signifikan pada taraf uji sig= 0.915. Sedangkan penelitian ini menetapkan t taraf uji-nya ($\alpha = 5\%$ atau 0.05), hal ini membuktikan bahwa sig 0.915 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian ini mengartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan belanja daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kabupaten Bireuen dalam menginventarisasi kebutuhan dan taksiran anggarannya hampir setiap tahun tidak tercapai seperti yang diharapkan. Artinya, taksiran dana yang disusulkan sering dimentahkan oleh tim penyusunan anggaran daerah pada saat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) secara keseluruhan dengan alasan berbagai faktor. Akibatnya banyak program tidak berjalan maksimal. Hasilnya pun tidak begitu terasa bagi masyarakat. Ironinya justru ada lembaga atau dinas lain yang ditambah lagi pagu anggaran dari anggaran yang diusulkan sebelumnya. Tendensi ini mengisyaratkan bahwa pihak legislatif lebih *concern* terhadap kegiatan yang mengarah pada aktivitas pembangunan fisik sarana dan prasarana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan penulis memperoleh kesimpulan yakni sebagai berikut: Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bireuen.

6. Daftar Pustaka

- Halim, Abdul 2012. *Akuntansi Pemerintahan berbasis Aktual*, Bandung :Alfabeta
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2010 Tentang Dana Perimbangan
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitati f dan R&D*, Bandung :Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

